

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali Zinuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 2016, , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Bambang Wahyu, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dendy Sugono , 2008, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.

I.G. Wursanto, 2010, *Manageman Kepegawaian*, Yogyakarta: Kenisikus.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.

J. Riwu Kaho, 1982, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Miftha Thoha, 2008, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridwan H. R, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo.

Sarman, Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sri Hartini, Setiajeng Kardasih, Tedi Sudrajat, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sujamto, 1986, *Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----, 1987, *Norma Dan Etika Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sukarna, 1990, *Prinsip-prinsip Administrasi*, Bandung: Mandar Maju.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta.

Y.W. Sunindhia, Ninik Widiyanti, 1987, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*, Jakarta: Bina Aksara.

Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

### **Jurnal dan Skripsi**

Anita AR, Moc. Ardi, Galuh Praharafi Rizqia, *Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinas Di Kabupten Penajaman Paser Utara*, Journal UNIBA Law Review, Vol.1.No.1, Februari, 2019.

Cindy Oeliga Yensi Afifa, *Penyalah Gunaan Aset Negara Terhadap Penjabat secara Pribadi Di Luar Fungsi Kedinasaan Dan Jabatan*, Rio Law Jurnal, Vol.1,No.2, Agustus, 2020.

I Ketut Rochineng, *Kewenangan Pengaturan Retribusi Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali*, Disertasi Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2017.

- Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Inovatif Volume VII No. II, Mei 2014.
- Misi S. Salunga, *Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi DI Luar Fungsi Jabatan dan Kedinasan*, Jurnal Hukum Legal Opinion Edisi 4, Vol.3, Tahun 2015.
- Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*, Jurnal Khazanah Hukum, Vol.2 No.3, 2020.
- Nirmala Sari, "*Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural*", Rio Law Jurnal, Vol.1, No.1, 2020.
- Philipus M, Hadjon, *Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya
- Rahmad Darmawan, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batubara*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.
- Rudy Kurniawan, *Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.
- Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Administrative Law & Governmance Journal, Vol. 2 Issue 1, Maret, 2019.
- Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol.1 No.1.2014

Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil  
Negara

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah  
Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik  
Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi dan  
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik  
Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan barang Milik negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang panjang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **Internet**

<http://ilmuadministrasinegara57.blogspot.com/2012/06/public-domain-and-private-domain.html>, diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 13.00 WIB.

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bapak Istopet, selaku Kabid Aset BPKD Kota Padang Panjang, Tanggal 21 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan bapak Ade Triswadi, selaku Kasubid Pengendalian, Penghapusan Dan Pengawasan Barang Milik Daerah Kota Padang Panjang, Tanggal 21 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Winarno, selaku Kepala BPKD Kota Padang Panjang, Tanggal 29 November 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Istopet, selaku Kabid Aset BPKD Kota Padang Panjang, Tanggal 29 November 2021.



Hasil wawancara dengan Bapak Ade Triswadi, selaku Kasubid Pengendalian,  
Penghapusan Dan Pengawasan Barang Milik Daerah Kota Padang Panjang,  
Tanggal 29 November 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Rony, selaku sopir Kepala BPKD Kota Padang  
Panjang, Tanggal 21 Februari 2022.

